

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. C. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2), 1–15.
- Aria, P. 2020. *Pemerintah Turunkan Tarif PPh Badan, Syarat dan Ketentuan Berlaku*. Katadata.
<https://katadata.co.id/pingitaria/finansial/5ef5a0d21c304/pemerintah-turunkan-tarif-pph-badan-syarat-dan-ketentuan-berlaku>
- Bagian Administrasi Kependudukan. (2021, Agustus 7). Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>
- Buburayai, H. I. (2017). *Kajian atas Rencana Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)*. Universitas Brawijaya.
- Carrol, R. (2008). *The 2001 and 2003 Tax relief: The benefits of lower tax rate: Tax Foundation, Fiscal Fact* (Issue 141).
<https://www.taxfoundation.org/files/ff141.pdf>
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18.
- Hadipurnomo. (2003). *Penghindaran Pajak Optimal versus penetapan Pajak Optimal*". Institut Pertanian Bogor.
- Hani, S., & Daoed, H. raziqa. (2013). Analisis Penurunan Tarif Pph Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pph Di Kpp Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1), 55–79.
- Hidayat, A. (2014). Analisis Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia. *Jurnal BPPK Volume 7 Nomor 1*.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran waib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.

- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270–289.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Andi Yogyakarta.
- Nasution, D. (2008). Hasil Akhir Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan yang Telah Disetujui Pansus Perpajakan DPR. *Departemen Keuangan Republik Indonesia*.
- Pangemanan, R. (2013). Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan PPH KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 730–740.
- Papp, T. K., & Takats, E. (2008). Tax Rate Cuts and Tax Compliance- The Laffer Curve Revisited. *International Monetary Fund*. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp0807.pdf>.
- Ratna sari, M. M., & Afriyanti, N. N. (2008). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur*, 1–21.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 35(02), 44–54.
- Santoso, W. (2008). Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 85–137.
- Santoso, Yusuf Imam. (2021, April 19). Masih minim, WP badan yang lapor SPT tahunan baru 22,5%. NewsSetup. <https://newssetup.kontan.co.id/news/masih-minim-wp-badan-yang-lapor-spt-tahunan-baru-225>.

- Suhendra, E. S. (2011). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 15(1).
- Sulaeman. (2021, September 1). Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Beri Diskon PPh Badan di 2022. Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/uang/terungkap-ini-alasan-pemerintah-beri-diskon-pph-badan-di-2022.html>.
- Suandy, E. (2006). *Perencanaan Pajak* (p. 18). Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1*. Salemba Empat.
- Yeni, R. (2013). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Zulvina, S. (2014). *Pengantar Hukum Pajak*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.